



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2020

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui media cetak dan / atau media elektronik.

Materi RLPPD merupakan Ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan Inovasi Daerah.

A. Gambaran Umum

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur, Kabupaten Garut mempunyai jumlah Kecamatan sebanyak 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 421 Desa. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sebesar 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Garut

Gambaran demografi Kabupaten Garut berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.312.764 jiwa atau meningkat 28.346 jiwa atau 1,24 % dari tahun 2019 sebanyak 2.284.418 jiwa.

B. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional

CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,22	66,12	-0,15 %
2	Angka Kemiskinan	8,98	9,98	11,14 %
3	Angka Pengangguran	7,28	8,96	23,08 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,02	-1,26	- 125,1 %
5	Pendapatan Per kapita	Rp21,96 (juta)	Rp22,45(juta)	2,23 %
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,352	0,352	0 %

Sumber : BPS Kabupaten Garut

1) Indeks Pembangunan Masyarakat

Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2015-2020 secara umum telah menunjukkan perubahan dan perbaikan dengan peningkatan 2,91 poin atau tumbuh 4,60%, dari sebesar 63,21 poin pada tahun 2015 menjadi 66,12 poin pada tahun 2020 (kategori “menengah”). Selama tahun 2019-2020, IPM menurun 0,11 poin atau tumbuh -0,15% dari tahun 2019 sebesar 66,22 poin,

2) Angka Kemiskinan

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 27,59 ribu jiwa dari 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 310,437 ribu jiwa (9,98 %) pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1%. Selama periode 2015-2020, persentase penduduk miskin menurun 2,83%, dan penurunan tersebut merupakan penurunan tertinggi keempat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Ditinjau dari tingkat penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2015-2020 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 2,83% dari tahun 2015 sebesar 12,81% pada tahun 2014 menjadi 9,98% pada tahun 2020. Apabila dibandingkan tingkat penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, maka tingkat penurunan kemiskinan berada di peringkat ke-4 setelah Kabupaten

Cirebon sebesar 3,51%, Kota Tasikmalaya sebesar 3,31%, dan Kabupaten Subang sebesar 2,96%, dengan penurunan lebih cepat dibanding agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 1,65% maupun Nasional sebesar 1,55%. Dari peringkat persentase penduduk miskin dibandingkan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, mengalami peningkatan 4 tingkat, dari peringkat ke-22 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2020. Namun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan kedepan perlu lebih ditingkatkan lagi sehubungan terjadinya lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1% dari sebesar 8,98% pada tahun 2019 menjadi 9,98% pada tahun 2020.

3) Angka Pengangguran

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.156.180 orang, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1.155.071 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.052.573 orang atau 91,04% menurun dari tahun 2019 sebanyak 1.071.026 orang atau 92,72% sehingga masih ada angkatan kerja yang belum bekerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Garut selama periode 2008-2020 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, pada tahun 2018 mencapai 7,07% meningkat dari tahun 2015 sebesar 6,50%, dan pada tahun 2019 mencapai 7,28%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,96%. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 103.607 orang, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 84.045 orang, dengan komposisi pernah bekerja pada tahun 2020 sebanyak 42.634 orang (41,15%) meningkat dari tahun 2019 sebanyak 33.766 orang (40,18%) dan Tidak Pernah Bekerja tahun 2020 sebanyak 60.973 orang (58,85%) meningkat dari tahun 2019 sebanyak 50.279 orang (59,82%). Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2020 sebesar 8,96% mengalami peningkatan 1,68% dari tahun 2019 sebesar 7,28%.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian selama periode 2011-2020 mengalami pertumbuhan berfluktuatif, pada tahun 2016 tumbuh 5,90% diatas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%), tetapi pada tahun 2017 mengalami perlambatan sebesar 4,91%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat mencapai 5,02% menyamai Nasional sebesar 5,02%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,07%. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai -1,26%, relatif lebih baik dibanding Jawa Barat sebesar -2,44% maupun Nasional sebesar -2,19%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE kabupaten Garut berada pada peringkat ke-13, diatas Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

5) Pendapatan Per Kapita

Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 2,23% atau dari semula Rp21,96 juta pada tahun 2019 menjadi Rp22,45 juta pada tahun 2020, Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2011-2019 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan, kondisi tersebut juga terjadi pada capaian Nasional maupun Provinsi, dan capaian Kabupaten Garut masih tergolong rendah atau hanya mencapai 52,65% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp.41,81 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp.57,12 juta.

6) Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2020 berada pada level menengah dengan besaran 0,352 relatif tidak berubah dari tahun 2019 dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut dibawah Jawa Barat sebesar 0,403 dan Nasional sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini tahun 2020 mencapai 102,22% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar 0,359-0,361 poin.

Namun demikian selama periode Tahun 2008-2020, Indeks Gini Kabupaten Garut menunjukkan nilai berfluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-13 dibawah Kota Bekasi dan diatas Kabupaten Subang. Kondisi tersebut menurun dibanding tahun 2019 pada peringkat ke-11 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tentu menjadi perhatian karena tren peningkatan PDRB dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) diiringi dengan pelebaran ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat. Merupakan sebuah tradeoff bagi daerah yang sedang mengalami perkembangan pesat antara mempercepat akselerasi pada aspek ekonomi atau memperkecil gap antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat dengan berpendapatan rendah.

C. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial)

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,30 %
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,52 %
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,70 %

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,31 %
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,07 %
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	83,33 %
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	102,51 %
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,05 %
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,78 %
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,84 %
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,77 %
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42,2 %
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	60,66 %
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,36 %
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52,85 %
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	60,65 %

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	10,59 %
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	48,86 %
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,32 %
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82,72 %
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	67,03 %
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100 %
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	81,30 %
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	7,86 %
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	100 %
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	48,88 %
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,86 %
		5	Jumlah Perumahan yang sudah atau sedang dibangun dilengkapi PSU	100 %
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.312.764
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	140.428
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13.393
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	58,10 %
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,87 Menit
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	80,15 %

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

D. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

1) Hasil EPPD

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa nilai LPPD Kabupaten Garut Tahun 2019 belum bisa disajikan, hal tersebut dikarenakan Kementerian Dalam Negeri belum mengumumkan capaian nilai dan predikat LPPD Tahun 2019. Sehingga hasil EPPD pada Tahun 2019 menyajikan data hasil EPPD Tahun 2018, dimana pada tahun 2018 Kabupaten Garut mendapat predikat LPPD “Sangat Tinggi” dan apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD di tahun 2018 maka capaian tersebut mencapai 100%

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 belum dapat disajikan, hal tersebut karena masih dalam proses penilaian, sehingga Opini BPK pada Tahun 2020 menyajikan data tahun 2019, dimana pada tahun 2019, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mendapat Opini WTP dan apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD di tahun 2019 maka capaian tersebut terealisasi 100%.

E. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran Daerah

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Garut.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- b) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 (Anaudited)**

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2019 (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
4.	PENDAPATAN	4.585.588.350.799,04	4.497.104.139.304,00	98,07	4.794.836.329.500,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	446.798.360.174,04	474.905.247.254,00	106,29	486.565.326.730,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	2.596.613.706.851,00	2.533.357.077.529,00	97,56	2.843.353.809.646,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.542.176.283.774,00	1.488.841.814.521,00	96,54	1.464.917.193.124,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Pada Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Garut ditargetkan sebesar Rp4.585.588.350.799,04 dan terealisasi sebesar Rp4.497.104.139.304,00 atau 98,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 yang berjumlah Rp4.794.836.329.500,00, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,21%. Penurunan pendapatan tersebut tidak terpisahkan dari kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional yang juga mengalami perlambatan dikarenakan dampak dari pandemi covid 19. Sumber pendapatan daerah diantaranya:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp446.798.360.174,04 dan dapat direalisasikan sebesar Rp474.905.247.254,27 atau 106,29%. Kontribusi realisasi PAD terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar 10,56%, meningkat 0,41% dibandingkan kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 10,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2019 sebesar Rp486.565.326.730,00, maka realisasi PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,40%.

Penurunan terbesar terjadi pada sektor pendapatan daerah dari hasil pajak dan hasil retribusi daerah dengan kontribusi terbesar menurunnya pendapatan pajak Hotel, Restoran dan pajak hiburan. Penurunan di sektor tersebut berkaitan dengan adanya kebijakan pembatasan sosial (PSBB) dalam rangka meminimalisir penyebaran covid – 19 yang berdampak terhadap kunjungan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Garut baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mempengaruhi rantai perekonomian terutama penyedia akomodasi dan makan minum bagi wisatawan.

Turunnya volume dan aktifitas perdagangan berdampak pada tidak tercapainya target dan menurunnya PAD pada sektor Pendapatan Retribusi Daerah khususnya retribusi pelayanan pasar, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

b) Dana Perimbangan

Sumber Pendapatan Daerah yang kedua adalah dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2.596.613.706.851,00 dan pada akhir Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp2.533.357.077.529,00 atau 97,56%. Kontribusi realisasi Dana Perimbangan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar 56,33%, menurun 2,97% dibandingkan kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 59,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2019 sebesar Rp2.843.353.809.646,00 maka realisasi Dana Perimbangan pada 2020 mengalami penurunan sebesar 10,90%.

c) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber Pendapatan Daerah yang terakhir adalah lain lain pendapatan daerah yang sah diantaranya pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dan dana transfer lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.542.176.283.774,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.488.841.814.521,00 atau sekitar 96,54%. Kontribusi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,11%, meningkat 2,55% dibandingkan kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 30,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 sebesar Rp1.464.917.193.124,00, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,63%.

2. Belanja Daerah

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 (Anaudited)

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2019
		ANGGARAN	REALISASI		
5.	BELANJA	4.900.110.755.023,04	4.574.185.446.658,00	93,35	4.594.611.035.095,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.890.947.659.555,52	2.642.643.007.717,00	91,41	2.489.883.192.579,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.009.163.095.467,52	1.931.542.438.941,00	96,14	2.104.727.842.516,00
	SURPLUS / (DEVISIT)	(314.522.404.224,00)	(77.081.307.354,00)	24,51	200.225.294.405,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.900.110.755.023,04 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.574.185.446.658,00 atau 93,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp4.594.611.035.095,00, maka realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44%. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk membiayai:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.890.947.659.555,52 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.642.643.007.717,00, atau 91,41%. Komposisi realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar 57,77%, meningkat 3,58% dibandingkan komposisinya pada tahun 2019 sebesar 54,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.489.883.192.579,00, maka realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,14%.

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.009.163.095.468,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.931.542.438.941,00 atau 96,14%. Komposisi realisasi Belanja Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar 42,23%, menurun 3,58% dibandingkan komposisinya pada tahun 2019 sebesar 45,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.104.727.842.516,00 maka realisasi Belanja Langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,23 %.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil daripada Anggaran Belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/ dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 (Anaudited)

KODE	URAIAN	TOTAL		%	REALISASI TA. 2019
		ANGGARAN	REALISASI		
6.	PEMBIAYAAN	314.522.404.224,00	317.715.618.593,00	101,02	129.047.109.819,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	329.272.404.224,00	331.628.618.593,00	100,72	157.817.037.741,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	329.272.404.224,00	331.628.618.593,00	100,72	157.817.037.741,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.750.000.000,00	13.913.000.000,00	94,33	28.769.927.922,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	14.750.000.000,00	13.913.000.000,00	94,33	10.347.459.500,00
	PEMBIAYAAN NETO	314.522.404.224,00	317.715.618.593,00	101,02	129.047.109.819,00
	SiLPA	0.00	240.634.311.239,00		329.272.404.224,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp314.522.404.224,00 dan sampai

dengan akhir tahun 2020 anggaran tersebut dapat direalisasi sebesar Rp317.715.618.593,00 atau 101,02%, yang terbagi:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp329.272.404.224,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp331.628.618.593,00 atau 100,72%, yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp14.750.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.913.000.000,00 atau 94,33%, terdiri dari:

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.497.104.139.304,00 atau 98,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.585.588.350.799,00 realisasi Belanja sebesar Rp4.574.185.446.658,00 atau 93,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.900.110.755.023,00 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp317.715.618.593,00 atau 101,02% dari anggaran sebesar Rp314.522.404.224,00 Dengan demikian, dari hasil realisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp240.634.311.239,00.

F. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terus berupaya mendorong tumbuhnya model inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar program inovasi Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020:

DAFTAR INOVASI DAERAH TAHUN 2020

NO	Nama Inovasi	SKPD Pengusung
1	Sinergitas Data Perusahaan Online	Disnakertrans
2	SIJARING (Sistem Penjaringan Pelatihan, Penempatan dan Pemagangan)	Disnakertrans
3	On Case (Online Call Service For Employment)	Disnakertrans
4	SIRELA (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan)	Disnakertrans
5	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Data Base Lembaga Pelatihan Kerja (SIP-LPK)	Disnakertrans
6	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Data Base Lembaga Pelatihan Kerja (SIP-LPK)	Disnakertrans
7	Pemanfaatan Informasi Pasar Kerja	Disnakertrans
8	SILEPEK (Sistem Informasi Lembaga Pelatihan Kerja)	Disnakertrans
9	SIMBADAG (Sistem Informasi Mendirikan Bangunan dan Gedung)	Dinas PUPR
10	PEPES IKAN BADAG (Pelaporan dan Pengawasan Ijin Mendirikan Bangunan dan Gedung)	Dinas PUPR

11	AMPE RETAK (Anjungan Pengesahan Rencana Tapak)	Dinas PUPR
12	SIRIUJAKON Sistem Informasi Rekomendasi Ijin usaha Jasa Kontruksi	Dinas PUPR
13	SIKO JANTAN (Sistem Informasi Kondisi Jalan dan Jembatan)	Dinas PUPR
14	Jati Diri Bangunan Gedung di Kabupten Garut	Dinas PUPR
15	SIRIB, RATWAL dan PKBK (Peningkatan Kualitas Infrastruktur melalui formulasi 3 in 1)	Dinas PUPR
16	SIJANDA (Sistem Informasi Jalan Lingkungan dan Drainase)	Dinas PUPR
17	SOMOLEK (Sistem Informasi Monitoring Kinerja)	Dinas PUPR
18	SIJANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)	Dinas PUPR
19	Desain Perencanaan Drainase menuju terwujudnya kawasan bebas banjir	Dinas PUPR
20	Belasungkawa Kami (Beri Layanan langsung Kepada Warga Untuk Akta Kematian)	Disdukcapil
21	Three in one (Pelayanan Dokumen Kependudukan KK, KTP dan Pencatatan Sipil)	Disdukcapil
22	Pasti Berkah (Pasangan Suami Istri Baru Menikah)	Disdukcapil
23	Mobil Pakansi (Mobil Pelayanan Administrasi kependudukan Terintegrasi)	Disdukcapil
24	Pasti Oke (Pelayanan Administrasi Online Kependudukan)	Disdukcapil
25	RAT Online	Dinas Koperasi dan UKM
26	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UKM melalui produk hukum daerah (Perbup dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas) di Kabupaten Garut	Dinas Koperasi dan UKM
27	Sapa Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
28	Optimalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah berbasis kemitraan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut	Dispusip
29	Pustakalana (Pustaka Berkelana)	Dispusip
30	Peningkatan Penerapan Kualitas Pengelolaan Arsip melalui Aplikasi Indeks Surat (ASIS)	Dispusip
31	Optimalisasi penilaian dan penyusutan Arsip melalui Sistem	Dispusip
32	SIDAT KAKAP (Sistem Informasi Data Produksi Perikanan Tangkap)	Diskanak
33	Sistem Pelaporan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat berbasis Web	Diskanak
34	SIBUDI (Sistem Aplikasi Simulasi Budidaya Ikan (SIBUDI))	Diskanak
35	POSKOHEMAT (Pos Kotoran Hewan Bermanfaat)	Diskanak
36	GARIT NGOREJAT (Ngaropea Cai Pikeun Karaharjaan Rakyat)	Dinas Pertanian
37	ULTRA - PERTANIAN (Unit Pelayanan Terpadu Agribisnis Pertanian)	Dinas Pertanian
38	Peningkatan Kinerja Perkebunan Rakyat menuju pengembangan kawasan perkebunan	Dinas Pertanian
39	Wahana Kampung Jeruk	Dinas Pertanian
40	Garut Edufarm Center (GEC)	Dinas Pertanian
41	TEPAT (Temana Edukasi Pertanian Anak)	Dinas Pertanian

42	SIPENYULAP (Sitem Informasi Penyuluh Pertanian Lapangan)	Dinas Pertanian
----	--	-----------------

Selain program inovasi di atas, terdapat juga inovasi yang dilaksanakan oleh UPT Puskemas di wilayah Kabupaten Garut dengan jumlah inovasi sebanyak 73 inovasi.

G. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) pada Tahun 2020 ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Upaya tersebut dilakukan dengan mengarahkan seoptimal mungkin berbagai sumber daya daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang dihadapi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam menghadapi permasalahan, keterbatasan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas yang dimantakan.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut tahun 2020 ini disampaikan, semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Garut, 26 Maret 2021

BUPATI GARUT

Ttd

H. RUDY GUNAWAN, SH.,MH.,MP.